STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP)

1. Instansi/Dinas/Badan/Biro

: Dinas Koperasi UMKM Provinsi NTB

2. Bagian/Bidang/Sekretaris/ Inspektur Pembantu/Wadir

RSUP/UPTD/UPTB : Bidang UMKM

STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP)

1. Instansi/Dinas/Badan/Biro : Dinas Koperasi UMKM Provinsi NTB

2. Bagian/Bidang/Sekretaris/

Inspektur Pembantu/Wadir

RSUP/UPTD/UPTB : **Bidang UMKM**

3. Sub Bagian/Sub Bid/Seksi : **Pemberdayaan UMKM**Lampiran: 13

No	Jenis Pelayanan	Prosedur Pelayanan	Persyaratan	Biaya (Rp)	Waktu	Dasar Hukum		Ket
INO						Jenis Pelayanan	Standar Pelayanan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pemberdayaan dan Pembinaan	- Mengajukan Proposal	1 Mengajukan	Gratis	2 bulan	DIPA	1 Undang-Undang Nomor	
	kelompok UMKM		permohonan				20 Tahun 2008 tentang	
							Usaha Mikro Kecil dan	
							Menengah	
		- Menginventarisasi Proposal yang sudah diterima.	2 Proposal				2 Peraturan Pemerintan Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil.	
		 Melakukan survey/penilaian langsung kelokasi Kelompok dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. 	3 Memiliki Surat Ijin Usaha atau Surat Keterangan dari Lurah/Desa				3 Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 4 tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah Daerah.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- Memiliki anggota kelompok minimal 10 orang.	4 Melampirkan Foto Copy KTP Pemilik bagi UMKM dan Foto Copy Pengurus bagi Kelompok.				4 Peraturan Gubernur NTB Nomor 27 tahun 2008 tentang Dukungan Dana Perkuatan kepada Koperasi,Usaha Mikro,Kecil, Menengah dan Kelompok	
		- Memiliki Pengurus yang aktif, dipilih dan diangkat oleh anggota melalui Rapat Anggota Kelompok.	5 Foto Copy Rekening Bank atas nama pemilik bagi UKM dan atas nama Kelompok/nama Pengurus bagi Kelompok.					
		 Diprioritaskan bagi kelompok yang belum pernah mendapat dukungan dana perkuatan dari program sejenis. 	6 Materai yang cukup					
		- memiliki administrasi kelompok (Pembukuan sederhana)						
		 memiliki Surat Keterangan dari Lurah/Desa atau Instansi yang berwenang. 						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Dukungan Dana Perkuatan	1 Mengajukan Proposal	1 Mengajukan surat	Gratis	2 bulan	DPA pada Biro Keuangan	1 Undang-Undang Nomor	
	kepada UMKM dan Kelompok		permohonan dengan			selaku SKPKD No.	20 Tahun 2008 tentang	
	Ekonomi Produktif		melampirkan proposal.			22/DPPA/TAPD/2008	Usaha Mikro Kecil dan	
						Tgl. 22 Oktober 2008	Menengah	
		2 Menginventarisasi Proposal	2 Memiliki Surat Ijin			Kode Rek. 6.2.2.04	2 Peraturan Pemerintan	
		yang sudah diterima.	Usaha atau Surat				Nomor 32 Tahun 1998	
			Keterangan dari				tentang Pembinaan dan	
			Lurah/Desa atau				Pengembangan Usaha	
			Istansi yang				Kecil.	
			berwenang					
		3 Melakukan survey/penilaian	3 Melampirkan Foto				3 Peraturan Daerah	
		langsung kelokasi Kelompok	Copy KTP Pemilik bagi				Provinsi NTB Nomor 4	
		dan Usaha Mikro Kecil dan	UMKM dan Foto Copy				tahun 2008 tentang	
		Menengah.	Pengurus bagi				Investasi Pemerintah	
			Kelompok.				Daerah.	
		4 Pembuatan SK penetapan bagi	4 Memiliki anggota				4 Peraturan Gubernur	
		Kelompok/UMKM yang akan	kelompok minimal 10				NTB Nomor 27 tahun	
		mendapatkan Dukungan Dana	orang.				2008 tentang Dukungan	
		Perkuatan					Dana Perkuatan kepada	
							Koperasi, Usaha	
							Mikro,Kecil, Menengah	
							dan Kelompok	
 		5 Penandatanganan Surat	5 Memiliki Pengurus					
		Perjanjian, Berita Acara	yang aktif, dipilih dan					
		Penyerahan dan Kwitansi	diangkat oleh anggota					
		pencairan Dana Dukungan	melalui Rapat Anggota					
		Perkuatan.	Kelompok.					
			- ,					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			6 Diprioritaskan bagi kelompok yang belum pernah mendapat dukungan dana perkuatan dari program sejenis.					
			7 memiliki administrasi kelompok (Pembukuan sederhana)					
			8 Pengurus Kelompok bersedia bertanggungjawab atas penggunaan dukungan dana perkuatan baik yang dimanfaatkan oleh Kelompok yang bersangkutan maupun oleh anggotanya					
			9 Foto Copy Rekening Bank atas nama PK/ pemilik bagi UKM dan atas nama Kelompok/nama Pengurus bagi Kelompok.					